



ANALISIS MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK KEBIJAKAN SEKOLAH RAKYAT: IMPLIKASI TERHADAP MANAJEMEN PENDIDIKAN DI INDONESIA

Ansori Zaini

Program Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Kebijakan Sekolah Rakyat muncul sebagai respons terhadap persoalan ketimpangan akses pendidikan dan kemiskinan di Indonesia. Meskipun diposisikan sebagai kebijakan afirmatif untuk kelompok rentan, proses kemunculannya belum banyak dianalisis dalam kerangka teori kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur untuk menganalisis kebijakan Sekolah Rakyat di Indonesia dengan menggunakan kerangka Multiple Streams Framework (MSF) oleh John W. Kingdon serta perspektif manajemen pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa program Sekolah Rakyat didorong oleh tingginya angka putus sekolah antarwilayah dan antarmenengah. Sekolah Rakyat diformulasikan sebagai kebijakan afirmatif berbasis asrama dan pembiayaan penuh bagi kelompok miskin dan miskin ekstrem. Kebijakan ini mendapatkan dukungan politik nasional dan komitmen penuh pemerintah sehingga menciptakan peluang kebijakan yang memungkinkan percepatan adopsi kebijakan secara menyeluruh. Dalam perspektif manajemen pendidikan modern, penguatan tata kelola dan optimalisasi teknologi pembelajaran menjadi prasyarat agar Sekolah Rakyat tidak berhenti pada simbol kelembagaan, melainkan efektif mendorong mobilitas sosial vertikal secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Sekolah Rakyat, Miskin, Multiple Streams Framework, dan kebijakan pendidikan.

PENDAHULUAN

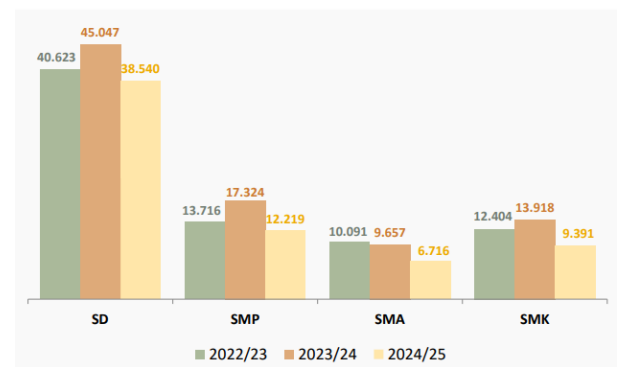
Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara sekaligus instrumen utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia dan memperkuat daya saing bangsa karena keberhasilan

membangun pendidikan berkontribusi besar dalam mencapai tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan (Alhumami, 2025). Oleh karenanya, pemenuhan pendidikan dasar kepada seluruh lapisan masyarakat

memiliki peran kunci dalam mengurangi kemiskinan dan secara positif berkaitan dengan pembangunan dan peningkatan produktivitas (Rose dan Dyer, 2008).

Dalam konteks itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu serta berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Norma ini mengandung prinsip kesetaraan akses, keadilan, dan keberlanjutan pembelajaran sebagai fondasi sistem pendidikan nasional. Pendidikan sebagai pondasi yang secara normatif wajib dimiliki oleh setiap warga negara.

Namun, meskipun jaminan hukum secara konstitusional telah tersedia, realitas menunjukkan bahwa tidak semua warga negara mampu menikmati pendidikan bermutu secara setara. Ketimpangan sosial-ekonomi, keterbatasan akses, serta kondisi sosial budaya tertentu menjadi faktor penghambat partisipasi pendidikan. Hal ini turut mendorong terjadinya angka putus sekolah di berbagai jenjang sekolah.



Gambar 1: Perkembangan Jumlah Peserta Didik Putus Sekolah Menurut Bentuk Satuan Pendidikan Tahun 2022/2023--2024/2025

Sumber : Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, 2025

Berdasarkan data di atas, angka putus sekolah masih sangat tinggi khususnya pada jenjang sekolah dasar, yang pada tahun 2024 mencapai 38.540 siswa. Hal yang sama juga terjadi pada jenjang SMP, SMA dan SMK, yang memiliki angka putus sekolah yang cukup tinggi khususnya anak-anak yang berasal dari keluarga miskin.

Anak-anak dari keluarga miskin ekstrem dan miskin menghadapi tekanan ekonomi yang mendorong mereka untuk bekerja pada usia sekolah, sementara lingkungan tempat tinggal yang tidak kondusif turut memperlemah proses pembelajaran yang menyebabkan putus sekolah. Anak-anak yang berada dalam keluarga miskin sangat rentan dan memiliki dampak multidimensional, termasuk kriminalitas, kesehatan, akses

pendidikan, pengangguran, dan konflik sosial (Maharani dkk, 2024).

Dalam hal ini, Pemerintah berupaya untuk menjawab persoalan tersebut melalui berbagai instrumen kebijakan. Salah satunya melalui menyediakan pendidikan layanan khusus. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus, peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat terpencil, serta mereka yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan/atau yang tidak mampu secara ekonomi berhak mendapatkan layanan pendidikan.

Namun, dalam praktiknya, tantangan masih muncul terutama pada kelompok masyarakat miskin ekstrem yang tidak hanya menghadapi hambatan akses pendidikan dan hambatan sosial-ekonomi yang kompleks. Dalam konteks ini, intervensi kebijakan tersebut belum sepenuhnya menjangkau dan menjawab persoalan keberlanjutan pendidikan dan pembinaan karakter secara menyeluruh.

Sebagai respons terhadap kebutuhan tersebut, secara konkret Presiden Prabowo Subianto menghadirkan kebijakan Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang mengamanahkan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah rakyat berasrama bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem (Ibnu dan Kurniawan, 2025).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, Sekolah Rakyat merupakan satuan pendidikan berbasis asrama dan pendidikan karakter yang menyelenggarakan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah secara terintegrasi bagi peserta didik yang berasal dari keluarga miskin ekstrem, miskin, dan rentan. Model berbasis asrama dirancang untuk menyediakan pendidikan formal gratis bagi anak-anak dari keluarga sangat miskin, miskin, dan rentan sebagai bagian dari strategi Indonesia untuk memberantas kemiskinan ekstrem (Rafsanjani dkk, 2026; Siregar, 2026)

Kebijakan Sekolah Rakyat juga tidak dapat dilepaskan dari dinamika agenda pembangunan nasional yang menempatkan penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai prioritas serta

strategi pemerataan pendidikan yang menekankan inklusivitas dan keadilan sosial (Izah dan Muyasaroh, 2025).

Meskipun demikian, sebagai kebijakan baru yang bersifat afirmatif dan terintegrasi lintas sektor, Sekolah Rakyat memunculkan pertanyaan analitis yang penting, bagaimana isu ketimpangan pendidikan dan kemiskinan ekstrem dikonstruksi sebagai masalah kebijakan yang mendesak? Bagaimana alternatif model berbasis asrama memperoleh legitimasi sebagai solusi yang tepat? Serta faktor politik apa yang memungkinkan kebijakan ini masuk sebagai agenda strategis pemerintah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap kebijakan Sekolah Rakyat tidak cukup berhenti pada aspek desain kelembagaan yang secara normatif telah terpenuhi, tetapi juga perlu menelaah proses perumusan dan dinamika agenda setting yang melatarbelakanginya. Dalam kerangka ini, pendekatan *Multiple Streams Framework* (MSF) yang dikembangkan oleh John W. Kingdon menjadi penting untuk menjelaskan pertemuan antara arus masalah (*problem stream*), arus kebijakan (*policy stream*), dan arus politik (*politics stream*) yang membuka peluang terbentuknya kebijakan (Hoefler, 2022).

Perpektif MSF menjadi daya tarik untuk mendalami manajemen pendidikan yang dilaksanakan dalam Sekolah Rakyat. Manajemen pendidikan sebagai perangkat dalam memanfaatkan sumber daya secara efektif, efisien, dan rasional untuk mencapai tujuan pendidikan (Sumual dkk, 2024). Manajemen pendidikan penting untuk memastikan seluruh komponen sekolah termasuk sumber daya manusia, finansial, dan sarana prasarana, yang tersedia dalam Sekolah Rakyat dapat dikelola secara optimal (Asrulla dkk., 2024).

Dengan demikian, kajian terhadap kebijakan ini menjadi penting untuk memahami bagaimana negara mengonstruksi dan merespons persoalan ketimpangan pendidikan, sekaligus menelaah dinamika manajemen pendidikan, aspek politik kebijakan yang memungkinkan kebijakan tersebut hadir sebagai bagian dari agenda pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur. Fokus penelitian adalah menganalisis kebijakan sekolah rakyat di Indonesia melalui kerangka *Multiple*

Streams Framework (MSF) dan Manajemen Pendidikan sebagai pisau analisis. Kerangka MSF menawarkan kerangka kerja komprehensif untuk membedah faktor kebijakan, memfasilitasi pemahaman mendalam tentang seluk-beluk kebijakan (Abraham dkk, 2024). Sementara itu, manajemen pendidikan memberikan sudut pandang yang lebih mendalam terkait pada adopsi pendekatan yang lebih holistik (Berkat dkk, 2024)

Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yaitu Data dianalisis dari berbagai sumber yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus; Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem; Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat.

Analisis dilakukan dengan memetakan tiga arus dalam MSF yaitu *problem stream*, *policy stream* dan *politics stream*. Ketiga arus tersebut dianalisis untuk menjelaskan terbukanya *policy*

window yang memungkinkan kebijakan Sekolah Rakyat masuk ke agenda formal pemerintah. Hasil analisis tersebut diperdalam melalui perspektif manajemen pendidikan sehingga dapat menghasilkan kerangka analisis yang menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kerangka *Multiple Streams Framework*, arus masalah terbentuk ketika suatu kondisi sosial dikenali secara luas sebagai persoalan publik yang mendesak untuk ditangani negara. Menurut Kingdon (2003) arus masalah berkaitan dengan mendefinisikan kondisi sebagai masalah dengan membandingkan kondisi saat ini dengan nilai-nilai dan keadaan yang lebih ideal (Knaggard, 2015).

Karakteristik	Tidak/Belum Pernah Sekolah (2)	Tidak Tamat SD (3)	Tamat SD Sederajat (4)	Tamat SMP Sederajat (5)	Tamat SMA/SMK Sederajat (6)	Tamat Pendidikan Tinggi (7)
Total	2,85	8,52	23,90	22,48	31,25	11,00
Jenis Kelamin						
Laki-laki	1,91	7,64	23,70	22,62	34,11	10,02
Perempuan	3,78	9,40	24,09	22,34	28,42	11,98
Status Disabilitas						
Nondisabilitas	2,39	8,03	23,75	22,82	31,81	11,20
Disabilitas	18,99	25,92	28,86	10,46	11,84	3,93
Kuintil Pengeluaran						
Kuintil 5	1,30	3,48	12,92	16,59	37,68	28,03
Kuintil 4	2,02	6,83	21,31	22,50	36,18	11,16
Kuintil 3	2,60	8,66	25,59	24,40	32,03	6,73
Kuintil 2	3,38	10,68	28,89	24,89	27,88	4,24
Kuintil 1	5,30	13,91	32,55	24,77	20,90	2,58
Klasifikasi Desa						
Perkotaan	1,74	6,18	19,33	21,58	36,84	14,33
Perdesaan	4,51	12,01	30,71	23,82	22,91	6,03

Gambar 2: Kondisi ketimpangan pendidikan antar jenjang dan wilayah
Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2025.

Pada konteks kebijakan Sekolah Rakyat, permasalahan mendasar yang mendorong lahirnya kebijakan ini adalah ketimpangan akses pendidikan. Persoalan ini menjadi isu krusial yang secara faktual khususnya wilayah pedesaan dan perkotaan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik di atas, bahwa masih terjadi kesenjangan pendidikan yang lebar antarkelompok masyarakat. Dari sisi ekonomi, 28,03% penduduk kuintil terkaya (Kuintil 5) menamatkan pendidikan tinggi, sedangkan pada kuintil termiskin (Kuintil 1) hanya 2,58%. Kesenjangan juga terlihat antarwilayah, di mana lulusan pendidikan tinggi di perkotaan sebesar 14,33%, lebih dari dua kali lipat perdesaan yang hanya 6,03%. Angka ini menegaskan bahwa akses dan capaian pendidikan masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan wilayah tempat tinggal.

Data tersebut menegaskan adanya kesenjangan yang nyata baik dari jenjang pendidikan maupun wilayah. Oleh sebab itu, inisiasi Sekolah Rakyat dipandang perlu memperhatikan sebaran wilayah dan jenjang sekolah.

Sebaran satuan pendidikan Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa pemerintah secara sadar merespons wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kerentanan sosial

dan ekonomi yang tinggi. Dengan mendasarkan pada fakta tersebut, desain kelembagaan Sekolah Rakyat dibagi ke dalam tiga bentuk yaitu Sekolah Rakyat Menengah Pertama; Sekolah Rakyat Menengah Atas; dan Sekolah Rakyat Terintegrasi.

Pada jenjang Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP), terdapat 32 satuan pendidikan yang tersebar di berbagai provinsi, mulai dari Sumatera Utara (Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan), Riau (Kota Pekanbaru), Sumatera Barat (Kota Padang dan Kabupaten Solok), hingga DKI Jakarta (Kota Administratif Jakarta Timur). Di Pulau Jawa, SRMP hadir di sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat seperti Sukabumi, Cimahi, Bandung, Bogor, dan Bandung Barat; di Jawa Tengah seperti Pati, Banyumas, dan Banjarnegara; serta di Jawa Timur seperti Kota Batu, Kabupaten Mojokerto, Kota Malang, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pamekasan. Ekspansi juga menjangkau Bali (Tabanan), Nusa Tenggara Barat (Lombok Barat), Nusa Tenggara Timur (Kupang), Kalimantan Selatan (Banjarbaru), hingga berbagai wilayah Sulawesi dan Maluku Utara seperti Manado, Sigi, Makassar, Gowa, Sidenreng Rappang, Takalar, Kendari, Ternate, dan Halmahera Utara.

Pada jenjang Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA), jangkauan

kebijakan semakin luas dengan 44 satuan pendidikan yang tersebar dari Aceh Besar di ujung barat Indonesia hingga Jayapura, Biak Numfor, dan Sarmi di Papua. Wilayah Sumatera terwakili oleh Tebing Tinggi, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Ogan Ilir, Padang Sidempuan, dan Pekanbaru. Di Jawa, SRMA hadir di Jakarta Timur dan Selatan, Bandung, Bogor, Bekasi, Magelang, Temanggung, Surakarta, Blora, Bantul, Sleman, Surabaya, Malang, Pacitan, Kediri, Lamongan, Wonosobo, Bojonegoro, dan Gresik. Ekspansi juga menjangkau Lombok Timur, Makassar, Takalar, Tidore Kepulauan, Ambon, dan Minahasa.

Selain itu, terdapat 24 Sekolah Rakyat Terintegrasi yang tersebar di Cirebon, Banyuwangi, Pasuruan, Sumedang, Ponorogo, Jember, Probolinggo, Jombang, Banjarbaru, Aceh Selatan, Rokan Hilir, Kepulauan Anambas, Tanjung Jabung Timur, Kaur, Empat Lawang, Bandung, Cimahi, Tuban, Wajo, Palu, Mamuju, Polewali Mandar, Katingan, dan Samarinda. Model terintegrasi ini menunjukkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menjawab kerentanan multidimensi yang dihadapi anak-anak dari keluarga miskin.

Sebaran Sekolah Rakyat dari berbagai jenjang tersebut memperlihatkan bahwa arus masalah

melalui pemetaan konkret terhadap kantong-kantong kemiskinan yang tersebar luas di berbagai wilayah. Dalam perspektif MSF, indikator ini berfungsi sebagai penguat legitimasi masalah. Ketika pemerintah mampu menunjukkan bahwa ketimpangan tersebut tersebar lintas provinsi dan tidak terpusat pada satu wilayah tertentu saja, maka isu tersebut memperoleh bobot politik yang lebih besar untuk masuk ke agenda nasional. *Problem stream* dalam kebijakan Sekolah Rakyat mencerminkan kesadaran atas representasi konkret dari komitmen negara untuk merespons ketimpangan akses pendidikan antarwilayah.

Berikutnya, dalam perspektif *policy stream* berkaitan dengan apakah ide Sekolah Rakyat telah diuji. Dalam alur ini, berbagai kemungkinan tindakan kebijakan diidentifikasi, dinilai, dan dipersempit menjadi pilihan yang tampaknya layak (Beland dan Howlet, 2016).

Berdasarkan data Kementerian Sosial (2025), Sekolah Rakyat tidak berkembang sebagai model tunggal, melainkan mengalami diferensiasi menjadi tiga tipologi satuan pendidikan, yakni Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) yang berjumlah 32 Sekolah, Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) yang berjumlah 44 Sekolah, dan Sekolah

Rakyat Terintegrasi yang berjumlah 24 Sekolah.

Diferensiasi ini mengindikasikan bahwa alternatif kebijakan dalam *policy stream* mengalami proses seleksi dan penyempurnaan desain. Gagasan awal Sekolah Rakyat tidak berhenti pada konseptual, tetapi terus mengalami pembaharuan secara adaptif melalui penyesuaian terhadap kebutuhan di lapangan serta segmentasi sasaran penerima manfaat. Misalnya, pada model Sekolah Rakyat Terintegrasi menjadi desain sekolah yang paling adaptif dan komprehensif. Model ini mengintegrasikan jenjang pendidikan sekaligus pembinaan sosial dalam satu kawasan terpadu, sehingga tidak hanya menjawab persoalan akses pendidikan, tetapi juga problem kerentanan sosial yang melingkupi peserta didik dari keluarga miskin ekstrem.

Integrasi tersebut mencerminkan perluasan cakupan kebijakan dengan pendekatan lintas dimensi kesejahteraan sosial. Dalam perspektif MSF, perkembangan ini menunjukkan bahwa solusi kebijakan mengalami adaptasi agar lebih responsif terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi kelompok sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian Siregar (2026) menjelaskan bahwa model Sekolah Rakyat melalui sekolah

berasrama yang didanai penuh, mengubah jaminan konstitusional yang abstrak menjadi akses pendidikan yang substantif dengan menghilangkan hambatan sumber daya struktural yang gagal diatasi oleh kebijakan pendidikan gratis lainnya. Hal ini menjadi pijakan penting bahwa dari aspek kebijakan Sekolah Rakyat sejatinya memberikan alternatif baru yang lebih komprehensif dibandingkan dengan model sekolah beasiswa lain. Dalam konsep sekolah asrama, para peserta didik dilatih dan didik sepanjang waktu tanpa adanya kekhawatiran biaya, mendapatkan asupan makanan bergizi, sarana dan prasarana sekolah yang memadai, dan lingkungan sekolah yang mendukung sehingga dapat meningkatkan fokus peserta didik. Hal ini menjadi keunggulan Sekolah Rakyat yang tidak mudah ditemukan pada model sekolah lain.

Selanjutnya, dalam perpektif *politics stream* mencakup dinamika opini publik, perubahan kepemimpinan, serta konfigurasi kekuasaan yang memengaruhi peluang suatu kebijakan untuk diadopsi (Beland dan Howlet, 2016). Dalam konteks ini, dimensi politik terlihat jelas melalui dukungan nasional yang kuat serta ekspansi wilayah implementasi yang tidak hanya berpusat di Pulau Jawa. Sebaran program hingga

wilayah Papua, Maluku, Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera menunjukkan bahwa kebijakan ini dirancang sebagai agenda nasional.

Secara spesifik, ekspansi ke kawasan timur Indonesia yang menghadapi disparitas akses pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan sosial tinggi memberikan gambaran atas keberpihakan politik terhadap agenda pemerataan pembangunan. Sekolah Rakyat menjadi instrumen politik afirmatif untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Di sisi lain, momentum perubahan kepemimpinan pada era Presiden Prabowo Subianto memberikan akar yang kuat dalam meligitimasi program Sekolah Rakyat. Program ini secara langsung dijalankan pada tahun pertama Kabinet Merah Putih sebagai program strategis nasional. Artinya, sebagai program strategis, segala sumber daya dikerahkan agar program ini dapat berjalan secara penuh. Komitmen politik (*political will*) ini sangat penting untuk menjamin dan mendukung keberhasilan program Sekolah Rakyat. Momentum politik ini dapat memastikan gagasan Sekolah Rakyat tidak diadopsi dan diimplementasikan secara luas.

Kebijakan Sekolah Rakyat memperoleh legitimasi untuk

diimplementasikan, yang kemudian berimplikasi pada penguatan manajemen pendidikan, khususnya dalam aspek perencanaan, tata kelola kelembagaan, dan pengelolaan sumber daya, sebagai bagian dari upaya sistematis pengentasan kemiskinan melalui jalur pendidikan.

Sementara itu, dalam perspektif manajemen pendidikan modern, temuan Berkat dkk (2024), salah satu kunci yang menjelaskan keberhasilan peningkatan kompetensi inovasi dan pemecahan masalah peserta didik, manajemen pendidikan perlu mengatasi hambatan, mengoptimalkan penggunaan teknologi, dan menerapkan strategi pembelajaran yang efektif. Oleh karena itu, manajemen pendidikan Sekolah Rakyat perlu mengadopsi pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan dengan investasi pada infrastruktur teknologi pendidikan. Optimalisasi penggunaan teknologi ini penting dengan memastikan akses yang setara dan adil terhadap infrastruktur teknologi bagi semua siswa dan guru.

Landasan ini penting sebagai acuan dalam pengembangan Sekolah Rakyat. Fokus pengembangan berikutnya dapat mendorong optimalisasi penggunaan teknologi dalam implementasinya, yang didukung pada pengembangan keterampilan terkini.

Pengembangan Sekolah Rakyat tidak boleh berhenti pada pencapaian terbentuknya kelembagaan secara simbolis, namun harus benar-benar dioptimalkan sebagai jalan untuk mobilisasi vertikal para peserta didik. Hal ini menjadi tantangan yang dihadapi manajemen Sekolah Rakyat agar bagaimana memastikan seluruh peserta didik dapat melalui lompatan status pendidikan, ekonomi, dan sosial yang berdampak positif bagi dirinya, keluarga, masyarakat luas dan bangsa Indonesia. Untuk itu, dengan dukungan *problem stream*, *policy stream* dan *politics stream* yang cukup memadai, maka selanjutnya manajemen pendidikan Sekolah Rakyat harus dikembangkan pada aspek peningkatan kualitas secara terpadu baik pada peserta didik, guru, maupun satuan pendidikan.

SIMPULAN

Analisis kebijakan Sekolah Rakyat menunjukkan bahwa program Sekolah Rakyat lahir dan berkembang sebagai hasil konvergensi tiga arus utama yaitu *problem stream*, *policy stream*, dan *politics stream*. Pada *problem stream*, isu kemiskinan ekstrem, ketimpangan akses pendidikan, serta kerentanan sosial kelompok miskin membentuk persepsi kolektif bahwa terdapat persoalan

struktural yang membutuhkan intervensi afirmatif dari Pemerintah.

Pada *policy stream*, gagasan Sekolah Rakyat berkembang melalui proses seleksi dan penyempurnaan desain. Diferensiasi model mulai dari SRMP, SRMA, dan Sekolah Rakyat Terintegrasi menunjukkan bahwa alternatif kebijakan terus berkembang dan dinamis menyesuaikan dengan kebutuhan. Sementara itu, pada *politics stream*, dukungan nasional terhadap agenda pengentasan kemiskinan ekstrem dan pembangunan sumber daya manusia menciptakan konfigurasi politik yang kondusif. Ekspansi implementasi hingga wilayah luar Jawa, termasuk kawasan timur Indonesia, mencerminkan adanya komitmen politik terhadap pemerataan pembangunan.

Penelitian ini merekomendasikan agar manajemen pendidikan Sekolah Rakyat perlu diperluas dengan optimalisasi pada kualitas pendidikan khususnya penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, B. G., Wang, W., Chanie, M. A., Addis, A. K., Cai, B., & Shi, F. (2024). Applying Kingdon's Multiple Streams Framework to understand health policy processes: A systematic review. *Academic Journal of Politics and Public Administration*, 1(5).
- Alhumami, A. (2025). Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan untuk mewujudkan SDM unggul yang produktif. *Bulletin of World Policy*, 8(3), 537–550.

- Asrulla, A., Indriyani, T., & Jeka, F. (2024). Tantangan Manajemen Sumber Daya Manusia Dalam Pendidikan Di Era Society 5.0. *Jurnal Genta Mulia*, 15(1), 161-178.
- Badan Pusat Statistik. (2025). Statistik pendidikan 2025 (Vol. 14). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/publication/2025/11/21/d048070f37740b0e04d99350/statistik-pendidikan-2025.html>
- Béland, D., & Howlett, M. (2016). The role and impact of the multiple-streams approach in comparative policy analysis. *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, 18(3), 221-227.
- Berkat, Setinawati, & Basrowi. (2025). The role of educational management in enhancing innovation and problem-solving competencies for students towards global competitiveness: A literature review. *Social Sciences & Humanities Open*, 11, 101280.
- Hoefler, R. (2022). The multiple streams framework: Understanding and applying the problems, policies, and politics approach. *Journal of Political Practice and Research*, 3(1), 1-5.
- Hoefler, R. (2022). The multiple streams framework: Understanding and applying the problems, policies, and politics approach. *Journal of Political Practice and Research*, 3(1), 1-5.
- Ibnu, K. I. M., & Kurniawan, T. (2025). Implementasi kebijakan Program Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI (studi kasus: Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan). *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 15(1).
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. (2025). Instruksi Presiden. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Izah, N., & Muyasaroh, S. (2025). Analisis wacana kritis Program Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerataan pendidikan di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 27525-27531.
- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. (2025). Ikhtisar data pendidikan tahun 2024/2025. Pusat Data dan Teknologi Informasi, Sekretariat Jenderal.
- Kingdon, J. W. (2003). *Agendas, alternatives, and public policies* (2nd ed.). Longman. (Original work published 1984)
- Knaggård, Å. (2015). The multiple streams framework and the problem broker. *European Journal of Political Research*, 54(3), 450-465.
- Maharani, C., Ningrum, D. A., Fatmawati, A. E., & Fadilla, A. (2024). Dampak kemiskinan terhadap kualitas pendidikan anak di Indonesia: Rekomendasi kebijakan yang efektif. *Journal of Macroeconomics and Social Development*, 1(3), 1-10.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus. (2013). Peraturan Menteri. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat. (2025). Peraturan Menteri Sosial. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia
- Rafsanjani, M. F., Mukti, S., Kosim, R. M., Hidayat, A., & Supiana. (2026). Analisis kebijakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat dalam tata kerja dan penerimaan peserta didik baru. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(01).
- Republik Indonesia. (2025). Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Rose, P., & Dyer, C. (2008). Chronic poverty and education: A review of the literature (CPRC Working Paper No. 131). Chronic Poverty Research Centre.
- Sapitri, S. D., Rochman, S., Indriyani, F., Anggreini, P., & Yuliani, S. (2025). Peran pendidikan berkualitas dalam memutus kemiskinan untuk mendukung SDGs di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 4(3), 1503-1512. <https://doi.org/10.31004/jpion.v4i3.585>
- Siregar, F. E. (2026). Sekolah rakyat dan pemenuhan hak atas pendidikan dari perspektif hukum konstitusi. *Jurnal Ius Constituendum*, 11(1), 218-236.
- Sumual, S. D. M., Rawis, J. A. M., Ngadiorejo, H., & Sumarauw, L. (2024). Teori manajemen pendidikan: Suatu analisis konseptual dan aplikasinya di sekolah. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301. Jakarta: Pemerintah Indonesia